

## Peranan Pemerintah Provinsi Papua dalam Upaya Mendorong Kota Jayapura Menjadi Pintu Gerbang Perdagangan ke Kawasan Pasifik

Danial Darwis<sup>1</sup> Claudia Conchita Renyoet<sup>2</sup>

Program Studi Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [danial.darwis@gmail.com](mailto:danial.darwis@gmail.com)<sup>1</sup> [claudiaudy14@gmail.com](mailto:claudiaudy14@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peranan pemerintah Provinsi Papua dalam upayanya untuk mendorong Kota Jayapura menjadi pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang potensi maupun hasil dari Provinsi Papua yang dapat dijadikan sebagai faktor-faktor pendukung untuk mendorong Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dan dokumentasi terhadap berbagai macam buku, jurnal, website, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah Pemprov Papua telah menjalankan peran yang optimal dalam upaya mendorong Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik, peran yang dilakukan antara lain sinergisasi program kerja pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, komunikasi antara Pemprov Papua dengan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, pemrosesan status Bandara udara Sentani sebagai tempat pengeluaran ekspor pemerintah pusat. Gubernur Papua melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan beberapa Gubernur di Papua Nugini. Potensi dan hasil yang menjadi komoditas dari Provinsi Papua untuk mendukung Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik adalah komoditas sektor pertanian dan perkebunan terdiri dari biji-bijian, daging, dan beras, serta lima komoditas unggulan ekspor, yakni, kayu merbau, tepung terigu, katu lapis, biji kopi, dan vanili.

**Kata Kunci:** Pemerintah, Provinsi Papua, Kota Jayapura, Perdagangan, Kawasan Pasifik

### Abstract

*This study aims to determine the role of the Papua Provincial government in its efforts to encourage Jayapura City to become a trading gateway to the Pacific Region, this study also aims to find out about the potential and outcomes of Papua Province which can be used as supporting factors to encourage Jayapura City to become a trade gateway to the Pacific Region. This study uses a qualitative research method with a case study approach. Data collection is done by studying literature and documentation of various kinds of books, journals, websites, and other written documents. The result of this research is that the Papua Provincial Government has played an optimal role in efforts to encourage Jayapura City as a trade gateway to the Pacific Region, roles that have been carried out include synergizing the work programs of the central, provincial and district / city governments, communication between the Papua Provincial Government and the Quarantine Agency. Agriculture Ministry of Agriculture, processing status of Sentani Airport as a place of export for the central government. The Governor of Papua signed a memorandum of understanding with several Governors in Papua New Guinea. The potential and yields that become commodities from Papua Province to support Jayapura City as a trade gateway to the Pacific Region are agricultural and plantation sector commodities consisting of grains, meat and rice, as well as five leading export commodities, namely, merbau wood, wheat flour, plywood, coffee beans, and vanilla.*

**Keywords:** Government, Papua Province, Jayapura City, Trade, Pacific Region



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Provinsi Papua merupakan wilayah yang terletak pada bagian paling timur dari Indonesia, wilayah ini berbatasan langsung dengan Kawasan Pasifik yang terdiri atas Papua

New Guinea (PNG), Fiji, Vanuatu, Solomon Island, New Caledonia, Kerajaan Tonga dan negara-negara lainnya di kepulauan Pasifik. Ibukota dari Provinsi Papua adalah kota Jayapura, kota yang terletak di teluk Jayapura pada bagian utara dari sepanjang garis yang memisahkan antara wilayah Papua sebagai bagian dari Indonesia dengan Papua New Guinea (PNG) yang merupakan bagian dari negara-negara kawasan pasifik. Terkait dengan perbatasan, di wilayah Jayapura ini terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yakni PLBN Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea (PNG), dimana PLBN tersebut baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017.

Posisi kota Jayapura yang terletak di Provinsi Papua dinilai sangat strategis untuk pengembangan aktivitas perdagangan. Oleh sebab itu, muncul sebuah gagasan untuk menjadikan kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke kawasan pasifik. Gagasan semacam itu muncul setelah Pemprov Papua dan Pemerintah PNG melakukan kerjasama di bidang pameran industri di ibukota PNG, Port Moresby. Kegiatan pameran industri tersebut mendapatkan sambutan positif dari pemerintah dan masyarakat Papua New Guinea (PNG). Oleh sebab itu, Pemprov Papua mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat sehingga Papua bisa langsung mengeksport hasil-hasil dari Papua, terlebih lagi kota Jayapura sebagai ibukota provinsi Papua memiliki akses yang mudah ke negara-negara di kawasan Pasifik baik melalui transportasi darat, laut, maupun udara.

Sekretaris Daerah Papua mengungkapkan dengan dibukanya perdagangan ke Negara Pasifik akan lebih banyak menguntungkan pemerintah dan masyarakat di Papua. Meskipun memang dalam aspek politik selama pemerintahan orde lama hingga reformasi seakan-akan terdapat penghalang yang sulit untuk ditembus dalam kaitannya hubungan antara Papua dengan negara pasifik termasuk Papua New Guinea (PNG). Namun, Sekda Provinsi Papua optimis bahwa paradigma semacam itu akan mampu untuk di terobos di bawah kepemimpinan nasional Jokowi dan Gubernur Papua saat ini yakni Lukas Enembe, melalui visi dan misinya untuk membangun Indonesia dari pinggiran, termasuk tentunya Papua sebagai wilayah perbatasan Indonesia yang terletak pada bagian paling Timur. Sekda Provinsi Papua ini menyampaikan dalam pelaksanaan forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa diharapkan forum tersebut mampu memformulasikan satu solusi yang cerdas guna menjadi referensi untuk pembukaan jalur perdagangan ke negara pasifik tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua juga menyatakan siap mendukung pembukaan jalur perdagangan ke negara pasifik. Forum OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan mampu melahirkan ide-ide cemerlang dalam rangka penyusunan program pembangunan pada sektor perdagangan tersebut. Perlu sebuah penajaman diskusi agar terdapat kesamaan pandang, supaya program pembukaan jalur ke negara pasifik dapat benar-benar terwujud melalui sinergi antara program pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, jika kota Jayapura mampu menjadi gerbang perdagangan ke negara-negara Pasifik maka ini merupakan peluang pasar.

Berangkat dari fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang peranan yang dimainkan oleh pemerintah provinsi Papua dalam upaya untuk mendorong kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke negara-negara di kawasan pasifik. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat salah satu agenda prioritas Jokowi-JK yang tercantum dalam "Nawacita" adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua juga memiliki program yang disebut sebagai "Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua"

(GERBANGMAS HASRAT PAPUA). Kedua program tersebut memiliki sinkronisasi yang dapat menjadi jembatan penyamaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui sebuah upaya untuk menjadikan kota Jayapura yang merupakan ibukota Provinsi Papua sebagai pintu gerbang perdagangan ke negara-negara pasifik, penelitian ini menekankan pada peranan yang dimainkan oleh pemerintah Provinsi Papua untuk mewujudkan hal tersebut.

Adapun fokus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini meliputi dua pertanyaan pokok, yaitu : (1) Bagaimana peranan Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya mendorong Kota Jayapura menjadi pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik ?; (2) Apa saja potensi maupun hasil dari Provinsi Papua yang dapat dijadikan sebagai faktor-faktor pendukung dalam upaya mendorong kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik ? Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya mendorong Kota Jayapura menjadi pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik, dan untuk mengetahui tentang potensi maupun hasil dari Provinsi Papua yang dapat dijadikan sebagai faktor-faktor pendukung bagi upaya untuk mendorong kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik. Kemudian untuk manfaat yang hendak dicapai adalah memberikan tambahan informasi bagi civitas akademik dan masyarakat umum mengenai peranan pemerintah Provinsi Papua dalam upaya mendorong Kota Jayapura menjadi pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik, selain itu juga untuk menjadi bahan rujukan bagi para peneliti yang memiliki kemiripan topik dengan penelitian ini.

### Tinjauan Pustaka

Penulisan penelitian ini secara umum mengambil studi kepustakaan mengenai peranan dari pemerintah daerah, lebih spesifik lagi pemerintah daerah Provinsi Papua. Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang peranan pemerintah daerah Provinsi Papua, antara lain sebuah penelitian yang berjudul "*Peranan Pemerintah Provinsi Papua dalam Menanggulangi Kemiskinan Demi Terwujudnya Millennium Development Goals (MDGs) 2015*", penelitian tersebut merupakan sebuah tesis yang ditulis oleh Yulianus Uropdana dalam rangka menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tatanegara di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian lain yang terkait dengan peranan dari pemerintah daerah Provinsi Papua adalah sebuah tulisan yang berjudul "*Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Antara Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori*", penelitian ini juga adalah tesis, ditulis oleh seorang yang bernama Gerard Infandi dalam rangka menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tatanegara di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tempat studi yang sama dengan penulis sebelumnya.

Kedua literatur penelitian yang telah dikemukakan diatas secara umum membahas mengenai peranan pemerintah daerah Provinsi Papua. Perbedaannya terletak pada sifat penelitian dan fokus kasus kajian yang dilihat oleh masing- masing penulis. Penelitian pertama berfokus pada peranan pemerintah Provinsi Papua terkait dengan kasus upaya penanggulangan kemiskinan beserta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya penanggulangan terhadap kendala tersebut demi terwujudnya *Millennium Development Goals (MDGs)* tahun 2015. Adapun penelitian kedua berfokus pada pembahasan mengenai peranan pemerintah daerah Provinsi Papua yang menekankan pada kasus kajian mengenai upaya penyelesaian sengketa wilayah yang terjadi antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, dimana peranan dari pemerintah daerah provinsi Papua dapat terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berbicara mengenai kewenangan Gubernur.

Seperti halnya kedua literatur di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini juga

membahas mengenai fokus kajian tentang peranan pemerintah daerah Provinsi Papua. Namun, kasus yang dikaji dalam penelitian ini lebih mengarah kepada isu yang terkait dengan perdagangan internasional, penekanannya mengarah pada upaya untuk mendorong kota Jayapura menjadi pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik. Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas terkait dengan kasus tersebut, yakni kasus terkait peranan yang dimainkan oleh pemerintah Provinsi Papua dalam upayanya untuk menjadikan kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik. Adapun beberapa kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah: Konsep Peranan, Pemerintahan Daerah, dan Perdagangan Internasional.

### **A. Konsep Peranan**

Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul "*Sosiologi Suatu Pengantar*", menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Soerjono Soekanto juga memberikan penjelasan tentang unsur-unsur peranan (*role*) yang antara lain meliputi: Aspek dinamis dari kedudukan, Perangkat hak-hak dan kewajiban, Perilaku sosial dari pemegang kedudukan, Bagian aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu: Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Menurut Komaruddin yang dimaksud peranan, yaitu: Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen, Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status, Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata, Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya, Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab-akibat.

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Jadi, peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Berdasarkan pada berbagai macam pengertian tentang peranan yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-

macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungannya kepadanya.

### **B. Konsep Pemerintahan Daerah**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : *"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang"*. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf b yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Salah satu tugas DPRD dalam pemerintahan adalah melakukan pengawasan, baik kepada pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan pemerintah Daerah dan kerjasama Internasional Daerah.

Bersamaan dengan adanya kemajuan hukum dan ketatanegaraan di zaman globalisasi ini maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (UU RI No. 32 Tahun 2004).

Aparat Pemerintah Daerah meliputi para pejabat yang memiliki tingkatan dalam jabatan struktural (Eselon). Pejabat pada tingkatan paling bawah dalam tataran pemerintahan daerah adalah pejabat Eselon IV atau pejabat setingkat kepala sub bagian, kepala sub bidang, dan kepala seksi, sedangkan pejabat setingkat di atasnya adalah pejabat Eselon III atau pejabat setingkat sekretaris, kepala bagian, dan kepala bidang. Pejabat setingkat di atasnya lagi yaitu pejabat Eselon II atau pejabat setingkat kepala Badan, kepala Dinas, dan Kepala Instansi.

### **C. Konsep Perdagangan Internasional**

Menurut Joseph Eby Ruin, perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa yang terjadi diantara negara yang berbeda. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Belay Seyoum, yaitu pertukaran barang dan jasa yang melewati perbatasan negara. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah transaksi pertukaran barang dan jasa melewati batas-batas wilayah negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat juga kita pahami sebagai proses tukar menukar barang dan jasa yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara guna memperoleh manfaat perdagangan dari sebuah negara. Fluktuasi ekspor dan impor dalam perdagangan internasional tergantung pada faktor pendorongnya. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah:

1. Adanya sumber kekayaan alam dan keanekaragaman kondisi produksi, yang merujuk kepada potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara. Contohnya Indonesia, memiliki potensi besar dalam memproduksi barang-barang hasil pertanian. Dengan kata lain, melalui perdagangan, suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkannya di dalam negeri dengan mendapatkannya dari negara lain.
2. Perluasan pasar sebuah produk yang dihasilkan oleh sebuah negara dimana produk tersebut tidak diproduksi oleh negara lain.
3. Penghematan biaya produksi/ spesialisasi, dan perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah besar, sehingga menghasilkan *increasing returns to scale* atau biaya produksi rata-rata yang semakin menurun ketika jumlah barang yang diproduksi semakin besar. Jadi, apabila suatu negara berspesialisasi memproduksi barang tertentu dan mengekspornya, biaya produksi rata-ratanya akan turun.
4. Perbedaan selera, sekalipun kondisi produksi di semua negara adalah sama, namun setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Contohnya, Norwegia mengekspor daging dan Swedia mengekspor ikan. Kedua negara akan memperoleh keunggulan dari perdagangan bilateral tersebut berdasarkan produk unggulan yang berbeda.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah-masalah sosial. Selanjutnya memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan dengan metode kuantitatif. Penelitian kualitatif fokus kepada makna individu dan kompleksitas persoalan. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian tentang sesuatu “kesatuan sistem” berupa program, kegiatan, peristiwa yang terkait oleh tempat, waktu dan ikatan tertentu. Studi kasus juga dapat kita pahami sebagai penelitian yang berusaha menyelidiki suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam suatu fenomena mulai proses awal hingga akhir penelitian. Diteliti sampai data mengenai peranan pemerintah Provinsi Papua dalam upaya mendorong Kota Jayapura menjadi pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik lengkap terkumpul berdasarkan pada kriteria penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian ini menggunakan studi literatur dan dokumentasi terhadap berbagai macam sumber-sumber tertulis baik dari buku, jurnal, website, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yakni model Miles dan Huberman. Tahapannya meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion*). Untuk memaksimalkan analisis data, peneliti menjabarkan langkah-langkahnya secara detail yang meliputi: (1) Mengolah dan mempersiapkan data, (2) Membaca keseluruhan data, (3) Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Untuk selanjutnya, data diinterpretasikan dalam bentuk kalimat berdasarkan pandangan informan, analisis peneliti dan dukungan sumber data lainnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

### Peranan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Upaya Mendorong Kota Jayapura Menjadi Pintu Gerbang Perdagangan Ke Kawasan Pasifik

Gagasan untuk menjadikan Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik telah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Papua sejak dari tahun 2017 yang

lalu melalui sebuah Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dimana forum tersebut diselenggarakan setelah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah PNG melakukan kerjasama di bidang pameran industri di ibukota PNG, Port Moresby, dimana kegiatan tersebut mendapatkan sambutan positif dari pemerintah dan masyarakat Papua New Guinea (PNG). Hal yang diharapkan adalah bahwa Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mampu memformulasikan sebuah solusi cerdas guna dijadikan referensi untuk pembukaan jalur perdagangan ke negara pasifik, sehingga Papua dapat langsung mengeksport hasil-hasil dari Papua melalui Jayapura dengan memanfaatkan akses darat, laut, maupun udara.

Sejak dari peristiwa sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua terus menjalankan perannya dalam upaya untuk menjadikan Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Max Oluwa juga mengatakan bahwa untuk dapat mewujudkan rencana pembukaan jalur perdagangan ke Kawasan Pasifik dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat baik dukungan secara diplomasi maupun pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan kesinambungan perdagangan tersebut. Melalui dukungan dari Pemerintah Pusat selanjutnya dilakukan sinergi antara program pusat, provinsi dan kabupaten/kota demi terwujudnya Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik.

Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya untuk mewujudkan keinginannya menjadikan Kota Jayapura pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik, mengingat kawasan tersebut memiliki jumlah populasi sekitar 15 juta jiwa yang dapat menjadi pasar potensial bagi Indonesia. Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian, Ali Jamil ketika melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe di Gedung Negara, Jayapura, pada hari Senin / 15 April 2019 menyatakan bahwa secara geografis Provinsi Papua merupakan pintu gerbang bagi Negara-negara di wilayah perairan Pasifik dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Papua dapat menjadi pintu masuk ekonomi. Konter layanan karantina pertanian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw setiap hari mensuplai bahan makanan pokok yang menjadi komoditas laport karantina. Dari sisi volume dan jenis cukup banyak, sebagai contoh produk turunan gandum berupa tepung terigu setiap harinya tercatat 10 ton. Belum lagi komoditas pertanian lainnya.

Kepala karantina Jayapura, Mukhlis Natsir juga menyampaikan data otomasi perkarantinaan, IQFAST di wilayah kerjanya, yakni ekspor produk non migas bidang pertanian dari Jayapura pada tahun 2018 mencapai Rp. 35,6 milyar. Dari data tersebut terjadi peningkatan di trisemester awal 2019 yakni ekspor sudah mencapai 29,1 % dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 10,3 milyar. Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian pertanian merupakan sebuah badan yang bertugas melakukan proteksi terhadap kemungkinan masuknya hama penyakit hewan dan tumbuhan, selain itu Barantan bersama-sama dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah harus melakukan lompatan kinerja guna mendongkrak ekspor asal komoditas pertanian. Lukas Enembe sangat mengapresiasi program yang tengah dilakukan oleh Kementan melalui Barantan dalam akselerasi ekspor. Beliau juga mengharapkan program bimbingan teknis, Agro Gemilang yang ditujukan terutama pada calon eksportir baru di papua dapat terus ditingkatkan. Gubernur Papua juga akan segera memproses status Bandara Udara Sentani sebagai tempat pengeluaran ekspor pemerintah pusat.

Papua harus menjadi lumbung pangan bagi Negara-negara di perairan pasifik. Pada kesempatan tersebut, Jamil memberikan secara simbolis akses *Indonesia Map of Agricultural Commodities Exports (I-MACE)* pada pemerintah Provinsi Papua. Aplikasi tersebut berisi tentang perkembangan data ekspor berbagai komoditas pertanian dari

daerah terkait, dimaksudkan agar pemerintah Provinsi Papua dapat membaca dan mengoptimalkan potensi pertanian yang ada di daerahnya. Melalui aplikasi ini diharapkan kebijakan pembangunan kawasan pertanian daerah berorientasi ekspor dapat lebih optimal. Hal yang menggembirakan adalah nilai ekspor produk non-migas bidang pertanian di Jayapura mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Keberhasilan ini merupakan bukti dari kerja keras para petani yang didorong dengan berbagai bantuan Kementerian Pertanian selama empat tahun terakhir. Hal ini semakin menegaskan akan peranan yang dimainkan oleh pemerintah Provinsi Papua untuk menjadikan Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik.

Terkait dengan peranan pemerintah Provinsi Papua dalam mendorong Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik, Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai juga mengatakan bahwa letak Papua yang berada paling timur Indonesia sangat strategis dan layak untuk menjadi gerbang hubungan dagang Indonesia dengan Negara kawasan Pasifik, dengan dukungan infrastruktur yang bagus, pemerintah pusat tinggal mendukung dengan regulasi transportasi darat, laut, maupun udara. Wanggai menyebutkan bahwa Papua Nugini dapat menjadi simpul penting jika Indonesia ingin lebih mengembangkan hubungan dagang dengan Negara di kawasan Pasifik. Wanggai menyebut Papua Nugini adalah jembatan menuju Negara di kawasan Pasifik lainnya, seperti Kepulauan Solomon dan Fiji. Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Nugini sudah sepakat untuk membuka jalur perdagangan. Hanya menunggu respon dari pemerintah pusat untuk mewujudkannya. Jadi, sebaiknya pemerintah jangan tinggal diam, pada tahap awal regulasi pemerintah harus lebih halus, para pengusaha bisa mengambil peluang tersebut dengan sebaik-baiknya.

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe juga terus meminta pemerintah pusat menetapkan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk Indonesia dalam kerjasama ekonomi di Kawasan Pasifik. Enembe memberikan penekanan bahwa jika ingin melakukan misi ekonomi harus ada program yang jelas, sehingga betul-betul menyentuh masyarakat Pasifik. Kalau hanya sekedar untuk menutupi isu politik itu bukannya merupakan sebuah hal yang baik. Gubernur Provinsi Papua menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua sudah mendeklarasikan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk masyarakat ekonomi ASEAN ke Negara kawasan Pasifik, hal tersebut dilakukan oleh Lukas Enembe pada saat kunjungan ke Papua Nugini pada September 2018. Gubernur provinsi Papua dalam rangka upaya untuk menjadikan Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke kawasan Pasifik juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan beberapa Gubernur di Papua Nugini, dengan harapan kerjasama ditingkatkan pada level kerjasama antar Negara. Hal tersebut dilakukan agar kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini dapat memberi manfaat.

Terwujudnya Papua dan Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik bagi Indonesia dan kawasan ASEAN merupakan sebuah keinginan yang terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Papua, mengingat kawasan Pasifik memiliki sekitar 15 juta jiwa populasi, hal ini merupakan pasar potensial bagi Indonesia, khususnya bagi komoditi pertanian dan perkebunan. Terjadi peningkatan permintaan untuk makanan impor di PNG karena meningkatnya pertumbuhan populasi, urbanisasi dan pengembangan industri, dan perubahan pola makan.

Secara khusus Gubernur Provinsi Papua mengklaim ada peningkatan bertahap dalam konsumsi beras, dan telah menjadi makanan pokok di daerah perkotaan dan beberapa daerah pedesaan. Namun, sebagian besar kebutuhan beras di impor. Lukas Enembe menyatakan bahwa diperkirakan impor beras tahunan mencapai 200.000 ton per tahun senilai lebih dari

Rp. 400 juta. Hal tersebut menyebabkan Pemerintah Provinsi Papua dapat menjadi pemasok beras dan komoditi lainnya di PNG melalui kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan kerjasama dengan Provinsi-Provinsi yang berada di Papua New Guinea (PNG). Salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU) Sister Province* dengan salah satu provinsi di Papua New Guinea (PNG), yaitu Provinsi Madang pada hari Rabu / 24 Juli 2019, hal tersebut merupakan tindak lanjut *Letter of Intent (LoI)* yang di tandatangani di Jayapura. *MoU* tersebut memiliki inti bahwa Pemprov Papua dan Madang berkeinginan untuk mendorong hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik antara kedua pihak. Kedua Provinsi mengakui pentingnya kesetaraan dan saling menguntungkan bagi kedua Provinsi. Selanjutnya sesuai dengan hukum dan peraturan di masing-masing pihak kedua Provinsi akan membangun kerjasama dalam bidang perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan sosial budaya, infrastruktur, perhubungan, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, karantina, pertambangan, *search and rescue* dan bidang-bidang lainnya yang disepakati para pihak.

Berbagai macam fakta-fakta yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah memainkan perannya dalam upaya untuk mendorong provinsi tersebut, khususnya Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik yang dimulai sejak dari tahun 2017 dan terus menerus didorong oleh pemerintah Provinsi Papua setiap tahunnya dengan berbagai macam upaya untuk merealisasikannya, baik dalam bentuk sinerginasi antara program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, begitu pula pemerintah Provinsi Papua telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan beberapa Gubernur di Papua New Guinea (PNG), salah satunya adalah Provinsi Madang, Pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur Lukas Enembe juga berharap program bimbingan teknis bagi calon eksportir baru Papua dapat terus ditingkatkan, demikian juga pemrosesan status Bandar Udara Sentani sebagai tempat pengeluaran ekspor pemerintah pusat. Hal-hal itu yang menjadi upaya dari Pemerintah Provinsi Papua dalam memainkan peranannya dalam mendorong wilayah tersebut sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik, sehingga Papua khususnya Kota Jayapura dapat menjadi lumbung pangan bagi Negara-negara di Kawasan Pasifik.

## **Pembahasan**

### **Komoditas Provinsi Papua Yang Dapat Dijadikan Sebagai Faktor-Faktor Pendukung Bagi Upaya Untuk Mendorong Kota Jayapura Sebagai Pintu Gerbang Perdagangan Ke Kawasan Pasifik**

Keinginan dari Pemerintah Provinsi Papua untuk menjadikan Papua khususnya Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan pasifik tentu harus di dukung oleh potensi maupun hasil dari Papua yang dapat dijadikan komoditas ekspor ke Kawasan Pasifik. Gubernur Provinsi Papua menyatakan bahwa komoditas pertanian dan perkebunan Indonesia merupakan komoditas potensial yang dapat di ekspor ke Kawasan Pasifik. Komoditas tersebut antara lain adalah biji-bijian, daging, dan juga beras.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) selama empat tahun terakhir nilai ekspor pertanian Papua mengalami peningkatan. Nilai ekspor produk pertanian di Jayapura mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari sisi volume dan jenis cukup banyak, sebagai contoh produk turunan gandum berupa tepungterigu setiap harinya tercatat 10 ton. Belum lagi komoditas pertanian lainnya seperti daging ayam segar, kayu lapis, biji kopi, vanili, susu, dan sosis. Secara umum ada lima komoditas unggulan ekspor yang dimiliki oleh Papua yang dapat diperdagangkan melalui Kota Jayapura, antara lain adalah

kayu merbau, tepung terigu, katu lapis, biji kopi dan vanili. Selain itu, juga perlu diketahui bahwa Provinsi Papua memiliki luas lahan pertanian kopi di Jayawijaya yang mencapai 1.910 hektar, luasan tersebut tersebar di 24 Distrik seperti di Walesi, Kurulu, Hubertus, dan Pyramid. Sedangkan produktifitas kopi Wamena berada pada kisaran 600 – 650 kg per hektar. Untuk produksi kopi pada tahun 2017 mencapai 125,8 ton. Kopi Wamena sendiri layak untuk di dorong menjadi komoditas ekspor karena kalau sudah diolah menjadi kemasan siap minum, potensi nilai jualnya lebih tinggi.

Selain komoditas yang disebutkan di atas, komoditas pertanian unggul yang dapat menjadi komoditas ekspor adalah biji pala, oil palm kernel, bunga pala, minyak sawit mentah, kopra, durian, alpukat, pisang, sarang semut, dan buah merah. Terkait dengan perkembangan data ekspor berbagai komoditas pertanian Papua dapat diakses melalui *Indonesia Map of Agricultural Commodities Exports (I-MACE)*. Aplikasi tersebut berisi tentang perkembangan data ekspor berbagai komoditas pertanian daerah terkait, dan dimaksudkan agar pemerintah provinsi dapat membaca dan mengoptimalkan potensi pertanian yang ada di daerahnya. Melalui perangkat aplikasi ini, harapannya kebijakan pembangunan kawasan pertanian daerah berorientasi ekspor dapat lebih optimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah di jabarkan dalam pembahasan, maka dalam penelitian ini penulis dapat menyusun kesimpulan sebagai berikut: Pemerintah Provinsi Papua telah menjalankan peran yang sangat optimal dalam rangka upaya untuk mendorong Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik, hal ini bisa kita lihat dari adanya upaya untuk melakukan sinergisasi antara program kerja pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang saling mendukung dan menguatkan antara satu sama lain. Pemerintah Provinsi Papua juga telah melaksanakan komunikasi dengan Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian melalui Gubernur Papua Lukas Enembe dalam rangka peningkatan nilai ekspor produk non-migas bidang pertanian di Jayapura dan terbukti mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama empat tahun terakhir. Gubernur Provinsi papua juga memberikan apresiasi program yang tengah dilakukan Kementan melalui Barantan dalam akselerasi ekspor dalam bentuk bimbingan teknis kepada calon eksportir baru di Papua. Lukas Enembe juga segera memproses status Bandar Udara Sentani sebagai tempat pengeluaran ekspor pemerintah pusat, Papua harus segera menjadi lumbung pangan bagi Negara-negara di perairan pasifik. Selain itu, Gubernur Papua juga meminta kepada pemerintah pusat untuk menetapkan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk Indonesia dalam kerjasama ekonomi di Kawasan Pasifik. Gubernur Papua telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan beberapa Gubernur di Papua Nugini dengan harapan bahwa kerjasama tersebut dapat ditingkatkan pada level kerjasama antar Negara, sehingga papua dapat menerima manfaat dari kerjasama tersebut, salah satu Provinsi di Papua Nugini yang telah melakukan penandatanganan MoU dengan pemerintah Provinsi Papua adalah Provinsi Madang.

Adapun potensi maupun hasil yang dapat menjadi komoditas dari Provinsi Papua untuk mendukung upaya menjadikan Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik adalah komoditas pada sektor pertanian dan perkebunan yang terdiri dari biji-bijian, daging, dan juga beras. Selain itu, juga terdapat lima komoditas unggulan ekspor yaitu berupa kayu merbau, tepung terigu, katu lapis, biji kopi dan vanili. Komoditas kopi Wamena juga menjadi salah satu komoditas unggulan yang harus didorong.

Adapun saran yang penulis dapat kemukakan dalam penelitian ini adalah: Pemerintah Provinsi Papua harus terus meningkatkan upaya yang dilakukannya untuk menjadikan Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik, agar dapat memberikan

manfaat yang luas bagi Papua secara khusus dan Indonesia secara umum, dalam bentuk kerjasama antar Negara Indonesia dan Papua Nugini dengan menjadikan Provinsi Papua sebagai satu-satunya pintu masuk Indonesia dalam kerjasama ekonomi di Kawasan Pasifik. Pemerintah Provinsi Papua harus terus mengupayakan untuk mencari sumber-sumber komoditas yang dapat dijadikan sebagai komoditas unggulan dalam aktivitas ekspor yang dilakukan ke wilayah Papua Nugini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana. 2007.
- Cresswell, John W. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.
- Ghony, M.D, dan Al-Manshur, F. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. 2012.
- Kansil, C.S.T, dan Kansil, Christine S.T. *Pemerintahan Daerah di Indonesia : Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Penerbit Alfabeta. 2009.
- Utama, Prabawa. *Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Ind-Hill-Co. 1991.